

Dinamika Diskursus Meritokrasi Birokrasi Sebagai Upaya Pemerataan Pendapatan Di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo

by Asep Heryyanto

Submission date: 30-Jan-2023 07:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2002447830

File name: Jurnal_Pak_Asep_-_Allen_Pranata_Putra.pdf (310.98K)

Word count: 5402

Character count: 35453

DINAMIKA DISKURSI MERITOKRASI BIROKRASI SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PENDAPATAN DI DESA LEBO KABUPATEN SIDOARJO

Asep Heryyanto¹; Muzakki²

³ Universitas Wijaya Putra, Surabaya^{1,2}

Email : asepheryyanto@uwp.ac.id¹; muzakki@uwp.ac.id²

ABSTRAK

Meritokrasi merupakan salah satu tema global yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan sebuah daerah. Fokus penelitian ini adalah diskursus meritokrasi pedesaan yang membuat keberlangsungan perangkat Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo berjalan tidak maksimal. Penelitian meritokrasi selalu menggunakan metode kualitatif, karena hanya dalam penelitian kualitatif keabsahan setiap informan dapat menjadi dasar analisa yang baik. Penelitian ini menggunakan penentuan informan secara *snowball sampling* dimana beberapa informan memungkinkan untuk ditambah untuk mendapatkan kejenuhan dan keabsahan data penelitian. Kesimpulan penelitian ini Pelaksanaan pemerataan pendapatan di Desa Lebo dapat diwujudkan melalui program pengembangan wilayah di daerah tersebut. Ini merupakan output hasil dari sebuah system yang terbentuk di dalam perangkat desa. Meritokrasi sangat penting untuk mengisi posisi-posisi tertentu yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu misalnya, hal ini akan meningkatkan kinerja dari perangkat desa. Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo membatasi meritokrasi pada tatanan perangkat desa, sehingga kebijakan desentralisasi dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kata kunci : Birokrasi; Meritokrasi; Pemerataan Pendapatan

ABSTRACT

Meritocracy is one of the global themes that is still being discussed today and is one of the important points in the development of a region. The focus of this research is the rural meritocracy discourse that makes the sustainability of the Lebo Kabupaten Sidoarjo Village apparatus run not optimally. Meritocracy research always uses qualitative methods, because only in qualitative research can the validity of each informant be the basis for a good analysis. This study used the determination of informants by snowball sampling where several informants allowed to be added to obtain the saturation and validity of the research data. The conclusion of this study Is the implementation of income equality in Lebo Village can be realized through regional development programs in the area. This is the output of a system formed in the village apparatus. Meritocracy is very important to fill certain positions that require certain educational qualifications for example, this will improve the performance of the village apparatus. Lebo Village, Sidoarjo Regency, limits meritocracy to the village apparatus order, so that the decentralization policy can be realized in accordance with the mandate of the Law.

Keyword: Bureaucracy; Climate Change; Green Economy

PENDAHULUAN

4

Meritokrasi merupakan salah satu tema global yang masih dibicarakan hingga saat ini. Salah satu yang mendasarinya adalah karena ada dominasi kelas penguasa yang mengatur pemilihan di tingkat tertentu, penelitian ini mengambil lokus pedesaan karena peneliti menganalisis bahwa seringkali pada tingkat birokrasi pedesaan meritokrasi tercipta tidak secara kompleks. Hal ini berpengaruh terhadap distribusi alat produksi yang berkorelasi juga dengan distribusi pendapatan. Penelitian (Harney, 2020) menunjukkan fenomena mengejutkan di Singapura yaitu meritokrasi menimbulkan penguasaan alat produksi.

Buku *“The Tyranny of Merit”* karya (Sandel, 2020) menanggapi secara kritis tentang demokrasi global yang mengacu pada menguatnya gelombang populisme kanan. Pendukung pernyataan tersebut adalah bahwa Trump dipilih 70 juta atau 48% pemilih Amerika Serikat. Kemenangan Biden tidak dapat diinterpretasikan kemenangan demokrasi Amerika Serikat yang berhadapan dengan populisme kanan. Populisme sayap kanan merupakan ideologi politik yang tidak sepakat dengan adanya konservatisme saat ini dan menggabungkan etnosentrisme, dan anti-elitisme. Merit sistem akan selalu berimplikasi pada pertentangan pandangan politik yang dianut oleh pembuat kebijakan publik.

Buku *“What is Populism?”* karya (Müller, 2016) nilai inti dari pemimpin populis merupakan penolakan keras terhadap keberadaan pluralism di masyarakat. Pemimpin tersebut akan mengklaim bahwa dialah yang menjadi satu-satunya orang yang mampu mewakili aspirasi masyarakat secara luas. Salah satu contoh penerapan gaya kepemimpinan populis adalah Trump mengklaim bahwa media massa yang bertentangan dengan pernyataannya sebagai *fake news* dan dianggap *“the enemy of the American people”*. Lantas populisme tidak berkorelasi secara langsung terhadap hasil akhir dari keputusan, akan tetapi gaya populisme lebih banyak ditentang karena dianggap pandangan yang tidak biasa. Tidak ada satupun yang dapat menjamin secara pasti apakah populisme dapat bekerja lebih baik dibandingkan dengan pandangan politik sebarangnya.

Meritokrasi sangat erat kaitannya dengan pembuat kebijakan publik, dalam hal ini yang berwenang adalah Kepala Desa. Lebih lanjut kuasa yang diberikan kepada Kepala Desa di Jawa Timur seringkali tidak maksimal dan tidak secara konsisten

menerapkan prinsip meritokrasi. Hal ini akan mempengaruhi pemerataan pendapatan yang terjadi, sehingga optimalisasi pembangunan tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini berupaya memberikan pemikiran alternatif penyebab lemahnya pemerataan pendapatan yang ada di desa. Fokus utama penelitian ini adalah meritokrasi pedesaan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya akan disajikan jumlah Kepala Desa di Jawa Timur pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Risiko *Climate Change*

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa total Kepala Desa di Jawa Timur adalah 1.919 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan meritokrasi sangat berimplikasi pada pemerataan pendapatan, apabila kebijakan yang diterapkan Kepala Desa tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi maka jutaan penduduk desa di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo akan merasakan dampaknya. Penelitian ini berupaya berkontribusi terhadap perkembangan meritokrasi pedesaan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut meritokrasi tidak hanya sebuah kebijakan terapan Kepala Desa, akan tetapi harus meruntut pada legalitas perundangan yang melandasi prinsip-prinsip meritokrasi.

Problem lain tentang meritokrasi adalah seperti yang dikemukakan oleh (Zhang et al., 2019) yaitu dilemma demokrasi yang mendasari pemerintahan desa meskipun kader desa terpilih berpotensi dapat dikendalikan atau tidak kendalikan. Pendapat lain bahwa meritokrasi adalah salah satu implikasi yang lebih luas tentang perubahan kelembagaan secara bertahap dan meritokrasi politik. Mengacu pada China akan sangat mudah dalam menerapkan meritokrasi, karena ideologi China doktrin tunggal Komunisme sehingga sifatnya sentralistik. Akan tetapi berbeda konteks dengan di Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. Permasalahan dilemma demokrasi menjadi sangat krusial dalam negara demokrasi.

Letak *state of the art* penelitian ini adalah pada pembahasan pedesaan dengan dugaan awal peneliti bahwa pedesaan seringkali tidak terekspos luas media sehingga banyak penyimpangan yang terjadi. Berbeda konteks dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengambil scope negara maupun kota di berbagai daerah. Meritokrasi di pedesaan menjadi penting karena banyaknya jumlah desa yang ada di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Tentu saja implikasi dari problem meritokrasi akan menentukan pemerataan pendapatan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan dari

keputusan Kepala Desa untuk mengangkat bawahannya pada posisi tertentu. Meritokrasi merupakan ideologi keadilan sosial yang didasarkan gagasan persamaan kesempatan bagi setiap individu untuk mencapai posisi tertentu. Keadilan sosial menjadi kunci utama dalam meritokrasi untuk bersaing atas dasar prestasi, bukan karena warisan maupun kekayaan.

Urgensi penelitian ini adalah menganalisis pemerataan pendapatan Desa di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditandai dengan munculnya kebijakan yang diterapkan pada tingkat desa yang dilakukan oleh berbagai perangkat desa. Meritokrasi bukan soal individu per individu tetapi sistem perangkat desa secara keseluruhan yang mengambil peran penting dalam pemerataan pendapatan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian ini berkontribusi pada pemikiran alternatif tentang bagaimana kontribusi pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai landasan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis tema yang telah ditentukan. Lebih detail tentang penelitian terdahulu yang dikutipkan pada penelitian ini akan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Selanjutnya akan dijabarkan letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. *Penelitian pertama*, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada meritokrasi pedesaan sementara pada artikel pertama meritokrasi pada bidang pendidikan. Artikel pertama menjadi dukungan problem empiris untuk diterapkan pada lokus pedesaan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo, *research question* yang dimunculkan pada penelitian tersebut akan diterapkan pada konteks yang berbeda. Lebih lanjut persamaan penelitian ini adalah pembahasan meritokrasi yang menjadi issue penting dalam legalitas dominasi kekuasaan ataupun kontradiksi dari dilemma demokrasi.

Penelitian kedua, penelitian ini akan digunakan sebagai analisa awal yang menunjukkan bahwa dominasi kelas penguasa secara aktif memperkuat sistem meritokrasi. Dukungan ini akan dihadapkan pada status kesuksesan yang dianggap

semu sekaligus tidak terstandarisasi dengan baik. Setiap individu dikatakan sukses dengan variable dan perhitungan yang berbeda-beda setiap orang, dan tergantung dari kualitas yang dimiliki individu tersebut. Penelitian yang akan dilakukan juga akan berkontribusi pada paradigma dominasi kelas penguasa yang melatarbelakangi adanya meritokrasi. Selanjutnya kontradiksi pada prinsip meritokrasi juga akan disajikan pada sub bab berikutnya.

Penelitian ketiga, persamaan penelitian ini adalah lokus penelitian terletak pada desa. Penelitian yang akan dilakukan juga akan mengambil lokus pedesaan, dengan perbedaan yaitu pedesaan di China menggunakan pandangan komunisme, sementara pedesaan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjomenggunakan pandangan demokrasi. Dua hal yang saling bertentangan sehingga menarik untuk diteliti tentang meritokrasi berdasarkan hasil penelitian terdahulu untuk dapat diterapkan pada konteks yang berbeda. Berikutnya akan disajikan hasil olah data Vosviewer berdasarkan database Scopus dan google scholar sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Olah Data Vosviewer

Berdasarkan hasil analisis database google scholar dan Scopus yang digunakan dalam aplikasi Harzing's Publish or Perish didapatkan data bahwa penelitian yang menggunakan tema meritocracy dan revenue yang terindeks Scopus terdapat 9 artikel. Kesembilan artikel tersebut umumnya dituliskan pada tahun 2011-2017, akan tetapi jika keyword disesuaikan meritocracy dan revenue equalization maka tidak ada artikel internasional terindeks Scopus yang menggunakan kombinasi kedua tema tersebut. Hal ini terlihat pada database yang ada pada Gambar 1 menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang menggunakan kombinasi kedua tema tersebut. Sementara yang terindeks google scholar sekitar 200 lebih penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengaturan data aplikasi Vosviewer menggunakan "Map based on data" dengan counting methode menggunakan Binary counting. Selanjutnya pada tahap pemilihan minimum number of occurrence of a term digunakan angka 2, hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan kata kunci agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sehingga didapatkan 246 kata kunci kombinasi dan pembahasan tentang kedua tema yang digunakan yaitu: meritocracy dan revenue. Penggunaan aplikasi Vosviewer menghasilkan state of the art yang lebih tersistem dan terarah tidak secara "cherry picking" pada beberapa peneliti lainnya. Ini merupakan salah satu metode yang tepat

dalam menunjukkan letak *state of the art* penelitian dan *novelty* yang diberikan. Secara data terindeks Scopus penelitian ini belum pernah ada yang meneliti menggunakan ketiga tema yang dituliskan dalam penelitian ini, sehingga jika dimungkinkan terpublish dalam Scopus akan menunjukkan *novelty* tema yang baru. Semakin kecil bulatan yang ditunjukkan pada Gambar 1 maka semakin sedikit penelitian tersebut terindeks *google scholar* dan Scopus.

Sistem Meritokrasi

Meritokrasi memiliki kata dasar “merit” yaitu manfaat, kualitas baik maupun pantas untuk dihargai. Istilah meritokrasi dicetuskan oleh Michael Young pada tahun 1958 “*The Rise of the Meritocracy, 1870-2033: An essay on education and inequality*”. Essai tersebut menggambarkan kondisi Kerajaan Inggris yang mengklasifikasikan pintu kecerdasan dan atas suatu kegagalan sistem pendidikan sehingga memanfaatkan anggota yang berprestasi dalam masyarakat. Sistem meritokrasi adalah syarat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang membentuk figure dengan kapabilitas dan integritas yang tinggi dalam menjawab tantangan global.

Secara otomatis dalam sistem meritokrasi terbentuk pada pemerintahan demokrasi, yang seluruh masyarakatnya dapat berpotensi dan memiliki peluang yang sama untuk bersaing maupun menempati posisi tertentu. Di Indonesia sangat perlu menerapkan sistem meritokrasi, akan tetapi meritokrasi tidak begitu saja berdampak positif. Seringkali meritokrasi melanggengkan dominasi kelas penguasa untuk dapat melakukan keinginan pribadinya diluar dari kepentingan rakyatnya. Selanjutnya akan disajikan hasil formulasi indikator teknis mekanisme sistem meritokrasi kepemimpinan daerah:

Tabel 3. Indikator Mekanisme Sistem Meritokrasi

Tinjauan Umum Rekrutmen dan otonomi Desa

Legalitas hukum otonomi Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan yaitu: a) Memberi pengakuan atas Desa yang ada beserta keberagaman sebelum atau sesudah terbentuknya NKRI; b) Memberikan kepastian hukum atas desa; c) Memajukan dan melestarikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d) Mendorong gerakan, Prakarsa, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi Desa; e) Membentuk Pemerintah Desa yang efisien dan efektif, profesional, terbuka serta bertanggung jawab; f) Meningkatkan pelayanan

publik bagi masyarakat Desa; g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa; h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; i) Memperkuat Desa sebagai subjek pembangunan.

Perspektif otonomi desa memerlukan perspektif baru selayaknya penelitian (Huda, 2019) yaitu: 1) Payung hukum bagi pemerintah Desa lebih jelas dan kuat; 2) Asas utama adalah asas rekognisi dan subsidiaritas; 3) Kedudukan Pemerintah Desa merupakan Pemerintahan masyarakat yang *hybrid* antara *self-governing community* dan *local self-government*; 4) Kepala Desa menjadi pimpinan masyarakat Desa; 5) Peran Pemerintah Kab/Kota lebih terbatas dan bersifat strategis; 6) Posisi pembangunan Desa menggunakan model *village driven development*; 7) Kemandirian Pemerintah Desa adalah fasilitas, emansipasi dan konsolidasi. Internalisasi sistem meritokrasi rekrutmen kepemimpinan daerah sebagai berikut:

Gambar 2. Internalisasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah

Otonomi desa mengisyaratkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi merupakan pengakuan kesatuan masyarakat yang berkaitan dengan eksistensi desa, hak tradisional, dan Prakarsa desa sebagai subjek Pemerintah Desa. Selanjutnya adalah asas subsidiaritas yaitu organisasi pemerintahan berbasis kemasyarakatan, pemerintah menyati dengan masyarakat. Kedua asas tersebut merupakan ide dasar tentang keberlangsung meritokrasi, tanpa adanya kedua asas tersebut pencapaian dari prinsip meritokrasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pengakuan terhadap Pemerintah Desa haruslah memiliki hak otonomi yang didasarkan penggabungan fungsi *self-governing* dan *local self-government*. Dinamika yang muncul terhadap pengaturan Desa memunculkan konsep otonomi desa yaitu *Pertama*, otonomi Desa asli; *Kedua*, otonomi Desa desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian meritokrasi selalu menggunakan metode kualitatif, karena hanya dalam penelitian kualitatif keabsahan setiap informan dapat menjadi dasar analisa yang baik. Ketidakmungkinan penggunaan kuantitatif dalam meritokrasi dikarenakan suatu analisa social yang tidak dapat dihitung secara deterministic matematis belaka. Penelitian ini menggunakan penentuan informan secara *snowball sampling* dimana

beberapa informan memungkinkan untuk ditambah untuk mendapatkan kejenuhan dan keabsahan data penelitian. Informan awal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif secara normative mencoba berdamai pada anomaly-anomali yang terjadi selama penelitian dilaksanakan sehingga menimbulkan kesimpulan ilmiah-alamiah yang dapat dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan. Metode ini tidak terlepas dari kaidah akademis bahkan pada proses reduksi data yang didapatkan. Dalam *indepth interview* penelitian kualitatif, peneliti harus secara konsisten untuk berada pada momentum yang sama dengan para informan penelitian. Peneliti harus mampu memahami kondisi empiris informan sehingga kejenuhan data yang didapatkan lebih akurat.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan dimuka, maka penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu Desa berkembang yang memiliki potensi PAD untuk dapat menjadi sebuah Desa maju.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Penelitian menggunakan triangulasi data yaitu berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Interpretasi Tinjauan Umum Rekrutmen dan Otonomi Desa

Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 217,6 hektar dengan jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan yaitu 8 km dan memiliki letak astronomis 7,4523 LS dan 112,6719 BT. Luas tanah sawah dan tanah kering Desa Lebo terdiri dari 52,5 hektar dan 165,1 hektar sehingga jumlahnya adalah 217,6. Selain itu struktur pemerintahan dengan status desa dan klasifikasinya swasembada dengan jumlah dusun 1. Secara administrative Desa Lebo memiliki 5 RW 18 RT dengan total Kepala Keluarga 1.872 sehingga dapat

dikategorikan Desa yang menengah diantara desa lain di Sidoarjo sedangkan secara luas lahan memiliki cakupan yang luas.

Konsep otonomi desa tidak terlepas dari bagaimana administrasi desa dilaksanakan demi keberlangsungan kesehatan demokrasi di daerah tersebut. Selain itu penerapan meritokrasi menjadi penting sehingga dapat menciptakan situasi dan pemerataan pendapatan yang terdistribusi dengan baik. Beberapa Desa di Jawa Timur agaknya tidak melihat ini sebagai salah satu urgensi yang tinggi, sehingga dalam pemilihan beberapa petinggi birokrat desa dilaksanakan dan dikendalikan oleh sekelompok oligarki yang ini mengendalikan secara berlebih potensi dari desa. Potensi ini salah satunya adalah kebijakan keputusan alokasi bagaimana pengelolaan lahan dilaksanakan. Banyak dari permasalahan yang terjadi dari *shifting* penggunaan tanah yaitu dari pertanian menuju industry seiring dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan suatu daerah membutuhkan serapan tenaga kerja yang tinggi pula. Problem *shifting* ini menjadi problem massif di seluruh daerah berkembang, tentu seorang Kepala Desa yang dalam hal ini adalah pemegang kebijakan tertinggi di Desa memiliki andil besar dalam pengaturan tersebut. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi para oligarki untuk secara penuh mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Kepala Desa ketika pemilihan berlangsung. Seringkali, pada tingkat Kepala Desa memang dipilih secara aklamasi akan tetapi pada tingkat perangkat desa lainnya dapat berpotensi disusupi oleh beberapa kepentingan para oligarki untuk mengendalikan alat produksi.

Analisa (Wulandari & Septyarini, 2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap *organizational citizenship behavior*, kepemimpinan transformasional tidak akan tercapai pada tingkat terbaik jika dikendali oleh oligarki. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variable lain yang dapat mempengaruhi *behavior* organisasi yaitu kuasa oligarki untuk menentukan arah kebijakan termasuk menguasai alat produksi di suatu daerah. Penguasaan alat produksi akan berimplikasi pada penguasaan dan pengaturan distribusi pendapatan, peneliti melihat bahwa di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo secara legalitas otonomi desa telah terlaksana dengan baik dan sesuai regulasi perundangan. Wawancara dengan Sekretaris Desa Lebo yaitu Bapak Aris yang menyatakan bahwa:

“Desa Lebo ini membutuhkan pengembangan wilayah yang baik, dan pengembangan yang baik membutuhkan sosok pemimpin yang baik pula. Secara legalitas perundangan juga dilakukan pemilu setiap lima tahun untuk menentukan Kepala Desa yang terpilih. Selain hal tersebut *background* dari Kepala Desa juga penting mengingat gaya kepemimpinan akan menentukan arah dan tujuan Desa Lebo kedepan”. (Wawancara dilakukan di Desa Lebo, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo berjalan secara demokratis dan otonomi daerah berjalan dengan baik. Selanjutnya wawancara tersebut mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa akan menentukan arah dan tujuan Desa yang bermakna bahwa kebijakan yang dihasilkan akan kecenderungan dengan *background* yang dimiliki Kepala Desa tersebut. Kepala Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo adalah pengusaha genteng tanah liat dimana jika kita meruntut pada *background* akan sangat tepat dalam pengembangan wilayah Desa Lebo.

Simpulan dari (Prayoga et al., 2021) pada konteks pemerintahan Desa Cipendeuy Kabupaten Purwakarta menjelaskan keberhasilan Kepala Desa untuk mengakomodir pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Berdasarkan *background* kepemimpinan dan struktur hierarki menunjukkan bahwa Desa Cipendeuy berhasil menjalankan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan teori pembangunan wisata berkelanjutan. Selain itu Desa Cipendeuy didukung oleh letak geografis yang memiliki potensi pariwisata yang baik. Analisa peneliti mendapati bahwa selain dari gaya kepemimpinan, terdapat pula potensi geografis dari lokasi Desa yang menentukan pemerataan pendapatan di daerah tersebut. Desa Lebo utamanya didapati bahwa kedepan akan dikembangkan destinasi wisata dimana restrukturisasi lahan yang luas akan dialihkan menjadi destinasi menarik dengan kombinasi dekorasi menarik di sentra kuliner dan beberapa kedai makanan di Desa Lebo.

Interpretasi Meritokrasi Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo

Meritokrasi merupakan seleksi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merestrukturisasi beberapa jabatan tertentu sehingga terdapat reformasi birokrasi. Ajuan baru (Madung, 2020) tentang demokrasi kontemporer berdasar pada ideologi meritokrasi dan munculah konsep serangan populisme yang merupakan sebuah pemberontakan melawan tirani meritokrasi tersebut. Tirani ini dirasakan oleh para pekerja yang

direndahkan oleh system meritokrasi dan kondisi politik liberal. Prinsip meritokrasi merupakan masyarakat yang memiliki prestasi individu sebagai ukuran dalam kehidupan sosial dengan memandang tinggi atau rendahnya status atas dasar prestasi tersebut. Meritokrasi akan diperhadapkan dengan konsep demokrasi dimana prestasi individu merupakan kriteria satu-satunya, maka prestasi sosial, pendapatan dan kesejahteraan ditentukan oleh prestasi individu telah mendiskreditkan solidaritas sosial dan menenggelamkan mimpi kesejahteraan sosial. Meskipun secara konteks legalitas perundangan telah terjadi proses demokrasi dalam pemilihan umum, sementara perangkat desa tidak dipilih berdasar pemilihan umum. Mereka ditentukan oleh kumulatif prestasi-prestasi tertentu yang didapatkan oleh individu. Penelitian lain (Pramuditha & Agustina, 2022) menjelaskan bahwa di Kecamatan Bogor Barat peran pemerintah melalui *e-government* terkonfirmasi tidak sepenuhnya terlaksana, karena harus mempertimbangkan dampak sosial. Hal ini berimplikasi pula pada penelitian yang dilakukan bahwa perangkat birokrasi Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo harus dapat memperhitungkan dampak sosial dari kebijakan yaitu pemerataan pendapatan. Penelitian (Desfitriady & Kusmayadi, 2016) merekomendasikan bahwa sosialisasi menjadi perihal penting dalam penerapan kebijakan baru. Selain itu pemerintah harus juga dapat memperhatikan *local wisdom* setiap daerah, yang harus dijaga sedemikian rupa sehingga dapat menjadi salah satu budaya yang dilestarikan. Penelitian (Suarsa & Verawaty, 2019) menunjukkan bahwa perangkat birokrasi harus memiliki keteladanan untuk dapat dicontoh dengan baik bagi masyarakatnya. Tentu keteladanan dan perlindungan terhadap *local wisdom* menjadi poin penting berikutnya yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo.

Kontradiksi yang terjadi adalah apakah mungkin perangkat desa jug dipilih secara langsung dan semua harus dipilih secara langsung agar supaya menjadi standar dari demokrasi? Tentu ajuan ini sedikit ambisius mengingat biaya dan waktu yang dikeluarkan terlampau tinggi sehingga justru menyebabkan inefisiensi pembiayaan. Suatu ketidakmungkinan bahwa setiap perangkat desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, lalu system demikian apakah tidak demokratis? Stigma tersebut tentu akan terus menjadi perdebatan ulung dan bagaimana seseorang dapat lebih bijak dalam memaknai meritokrasi. Dalam hal ini peneliti mengamati bahwa pemilihan umum tidak dapat dijadikan standar utama dalam demokrasi yang berimplikasi pasti pada

pemerataan pendapatan karena yang terpilih tentu akan mendapatkan kuasa lebih untuk menentukan kebijakan. Lebih lanjut konsep meritokrasi tidak sepenuhnya buruk, akan tetapi tidak boleh mayoritas penggunaanya tercapai. Batasan dari system meritokrasi juga memungkinkan pada posisi tertentu diisi berdasarkan prestasi individu misalkan keahlian dalam penataan ruang.

Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo memiliki system meritokrasi yang dibatasi sesuai dengan kaidah dan porsinya masing-masing jabatan. Tentu mayoritas penduduk terhadap keyakinan keagamaan tertentu menjadi *background* kuat yang menjadikan seseorang dipilih secara aklamasi dan ditunjuk sebagai seorang pemimpin, dengan demikian peran pengaturan meritokrasi tertinggi ada pada Kepala Desa yang terpilih tersebut. Dia lah yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan penerapan system meritokrasi yang berujung pada pemerataan distribusi pendapatan di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo.

4
Pelaksanaan pemerataan pendapatan di Desa Lebo dapat diwujudkan melalui program pengembangan wilayah di daerah tersebut. Ini merupakan output hasil dari sebuah system yang terbentuk di dalam perangkat desa. Pernyataan yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa:

“Meritokrasi berakar dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh kesempatan tersebut sehingga dia dapat berpotensi memimpin sebuah kelompok atau organisasi. Permasalahannya adalah keterpurukan meritokrasi dalam perkembangan sosial. Contohnya, untuk posisi jabatan tertentu dibutuhkan sejumlah tingkatan pendidikan. Kondisi tiap desa tidak dapat disamakan kualitas pendidikannya, hal ini ini menjadi penyebab adanya kesulitan dalam penerapan meritokrasi”. (Wawancara dilakukan di Desa Lebo, Pukul 11.00 WIB)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam kondisi empiris meritokrasi di beberapa daerah sulit untuk diterapkan karena tidak setiap daerah memiliki kualitas pendidikan yang baik. Sehingga posisi tertentu yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tidak dapat tercapai, kontradiksinya adalah bahwa setiap daerah harus ada yang terpilih untuk mewakili atau setidaknya menjadi pemimpin daerah tersebut. Hal ini tentu saja perlu ditoleransi dan tidak serta merta mengunggulkan idelaisme semata karena konteks teoritis dan empiris utamanya berbeda. Temuan dari Desa Lebo

Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pandangan meritokrasi dan pemerataan pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis meritokrasi di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo dimana secara aktif meritokrasi akan berdampak pada pengembangan wilayah Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo. Dampaknya yang dihasilkan juga akan berkorelasi terhadap pemerataan pendapatan desa, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Desa (PADDesa). Di sisi lain meritokrasi memiliki kontradiksinya yaitu tidak dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh di tataran system, tentu saja meritokrasi ini akan berseberangan dengan demokrasi dimana setiap individu dapat dipilih dan menjadi pemimpin berdasarkan aklamasi suara terbanyak. Lebih lanjut meritokrasi sangat penting untuk mengisi posisi-posisi tertentu yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu misalnya, hal ini akan meningkatkan kinerja dari perangkat desa. Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo membatasi meritokrasi pada tatanan perangkat desa, sehingga kebijakan desentralisasi dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengkomparasikan dengan Desa sejenis di Kabupaten Sidoarjo, besar harapan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tema meritokrasi dengan mengkombinasikan lokus penelitian yang lebih luas. Terlepas dari hal tersebut meritokrasi akan selalu menjadi issue menarik di setiap perdebatan dengan pandangan yang berseberangan. Penelitian ini juga terbatas pada paradigma yang digunakan hanya disiplin pemerataan pendapatan yaitu ekonomi, besar harapan untuk penelitian selanjutnya dapat membahas tema tersebut dengan multidisiplin ilmu lainnya.

Saran

Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan meritokrasi system yang berimplikasi logis pada pemerataan pendapatan masyarakat. Meritokrasi menjadi penting sebagai penerapan system yang bisa dilakukan demi peningkatan layanan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Pemerintah harus dapat mengarahkan dengan aktif bagaimana perangkat Desa menjalankan birokrasi demi pemerataan pendapatan di daerah masing-masing.

Penelitian ini terbatas pada lokus yang sempit untuk dapat membahas tema global selayaknya meritokrasi. Penelitian ini berupaya berkontribusi untuk meningkatkan potensi desa berkembang untuk dapat menuju pada desa maju, dengan adanya peningkatan ini diharapkan pemerataan pendapatan masyarakat dapat lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis lokus penelitian lebih luas sehingga mendapatkan referensi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M. A. (2020). *Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah Dalam Penguatan Demokrasi Lokal Di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat*. Universitas Hasanuddin.
- Desfitriady, & Kusmayadi, T. (2016). *Analisis Kajian Sosial Ekonomi Pembangunan Dan Perluasan Toserba "X."* 15(2), 1–23.
- Elia, D. D. (2018). *Industrial policy : the holy grail of French cybersecurity strategy? Industrial policy : the holy grail of French cybersecurity strategy?**. 8871. <https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1553988>
- Harney, S. (2020). Meritocracy in Singapore. *Educational Philosophy and Theory*, 52(11), 1139–1148. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1753034>
- Huang, H., & Li, T. (2018). A centralised cybersecurity strategy for Taiwan A centralised cybersecurity strategy for Taiwan. *Journal of Cyber Policy*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1553987>
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Jin, J., & Ball, S. J. (2020). Meritocracy, social mobility and a new form of class domination. *British Journal of Sociology of Education*, 41(1), 64–79. <https://doi.org/10.1080/01425692.2019.1665496>
- Madung, O. G. (2020). Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel. *Jurnal Ledalero*, 19(2), 127. <https://doi.org/10.31385/jl.v19i2.212.127-144>
- Müller, J.-W. (2016). What is populism? In *What Is Populism?* University of Pennsylvania press.
- Pramuditha, R., & Agustina, I. (2022). Persepsi Masyarakat Pengguna Atas Kualitas Pelayanan E-KTP Pada Kecamatan Bogor Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 884–901.
- Prayoga, T., Ramdani, R., & Sugiarti, C. (2021). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pemerintahan Desa. *Kinerja*, 18(3), 446–450. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9802%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/9802/1500>
- Rosati, P., Gogolin, F., Lynn, T., Gogolin, F., & Lynn, T. (2020). Cyber-Security Incidents and Audit Quality. *European Accounting Review*, 0(0), 1–28. <https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1856162>
- Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?* Penguin UK.
- Suarsa, A., & Verawaty, V. (2019). Local Wisdom Values Governance As Non-Financial Intangible Assets in Supporting Indigenous Peoples' Sustainability in Kampung Pulo Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp19-28>
- Wulandari, N., & Septyarini, E. (2022). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan*

Transformasional, Kualitas Kehidupan Kerja, Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship. 19(1), 160–169.
<https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10800>

Zhang, H., Chen, H., & Wang, J. (2019). Meritocracy in Village Elections: The “Separation of Election and Employment” Scheme in Rural China. *Journal of Contemporary China*, 28(119), 779–794.
<https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1580424>

TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Jumlah Kepala Desa Di Jawa Timur

No	Desa Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Sampang	8
2	Kabupaten Bondowoso	11
3	Kabupaten Bangkalan	12
4	Kota Batu	12
5	Kabupaten Madiun	15
6	Kabupaten Probolinggo	15
7	Kabupaten Situbondo	22
8	Kabupaten Pamekasan	22
9	Kabupaten Pasuruan	28
10	Kabupaten Jember	28
11	Kabupaten Banyuwangi	29
12	Kabupaten Lumajang	33
13	Kabupaten Nganjuk	41
14	Kabupaten Pacitan	41
15	Kabupaten Tuban	45
16	Kabupaten Sumenep	47
17	Kabupaten Malang	52
18	Kabupaten Mojokerto	52
19	Kabupaten Trenggalek	56

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
(Harney, 2020) (Rosati et al., 2020)(Rosati et al., 2020)(Rosati et al., 2020)(Rosati et al., 2020)(Rosati et al., 2020)(Rosati et al., 2020)	<i>Meritocracy in Singapore</i>	Berdasarkan penelitian ini, meritokrasi jauh dari sistem pengelolaan sumber daya yang langka. Keparahan meritokrasi muncul pada sektor pendidikan setelah mengalami privatisasi sarana dan pembatasan peraturan dalam pelatihan, lembaga pendidikan memberlakukan pelajaran yang lebih berat untuk mahasiswa sarjana bisnis. Mahasiswa dikenakan semacam pedagogi skizofrenia.	To cite this article: Stefano Harney (2020): Meritocracy in Singapore, Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1753034
(Jin & Ball, 2020)(Elia, 2018)(Elia, 2018)(Elia, 2018)(Elia, 2018)(Elia, 2018)	<i>Meritocracy, Social Mobility And A New Form Of Class Domination</i>	Dominasi kelas menginisiasi meritokrasi yang dilakukan pemerintah untuk seolah mewakili keadilan sosial dan melegitimasi – menjelaskan – ketidaksetaraan kelas. Penelitian ini membahas tentang hubungan meritokrasi dengan	To cite this article: Jin Jin & Stephen J. Ball (2019): Meritocracy, social mobility and a new form of class domination,

2018)		mobilitas sosial ke atas dan dominasi kelas. Melalui “ kesuksesan ” di sekolah, mereka menjauh dari lokalitas dan sejarah kelas pekerja, dan menjadi kelas ketiga ” yang intinya berada pada meritokrasi itu sendiri.	British Journal of Sociology of Education, DOI: 10.1080/01425692.2019.1665496
(Zhang et al., 2019)(Huang & Li, 2018)(Huang & Li, 2018)(Huang & Li, 2018)(Huang & Li, 2018)(Huang & Li, 2018)(Huang & Li, 2018)	<i>Meritocracy in Village Election: The “Separation of Election and Employment” Scheme in Rural China</i>	Dilema demokrasi dihadapi Pemerintah China dalam penerapan kebijakan pemerintahan pedesaan. Meskipun kader desa terpilih mungkin tidak mampu atau tidak dapat dikendalikan, pemerintah daerah tidak dapat mengubah pemerintahan desa tersebut. Solusi alternatif yang diupayakan adalah penerapan “ Pemisalahan Pemilu dan pekerjaan ”. Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa usulan tersebut menambah sistem manajemen kader desa meritokratis baru kedalam demokrasi desa	To cite this article: Han Zhang, Huirong Chen & Jishu Wang (2019): Meritocracy in Village Elections: The “Separation of Election and Employment” Scheme in Rural China, Journal of Contemporary China, DOI: 10.1080/10670564.2019.1580424

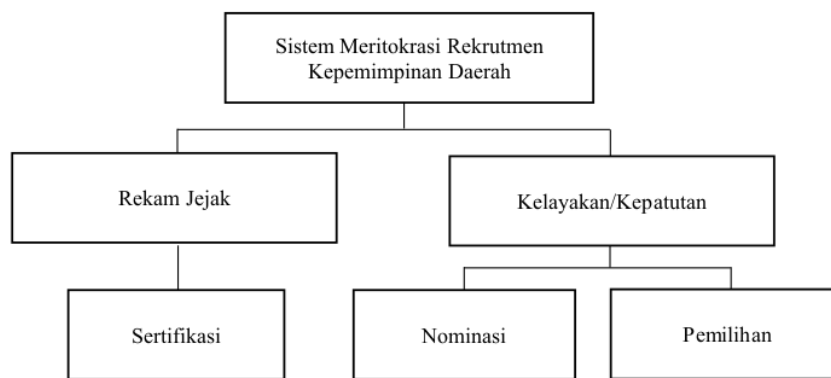


Gambar 1. Hasil Olah data Vosviewer
Sumber: Vosviewer, Data diolah Penulis (2022)

Tabel 3. Indikator Mekanisme Sistem Meritokrasi

No	Syarat Rekam Jejak	Alat Verifikasi	Keterangan
1	Berpendidikan formal paling rendah Strata 1 untuk calon Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota dan minimal Strata 2 untuk calon Gubernur-Wakil Gubernur	Ijazah atau SK pengganti Ijazah	1 buah dokumen
2	Mempunyai kompetensi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan moralitas yang baik serta pengalaman yang memadai untuk diusulkan menjadi calon dalam Pilkada	Riwayat organisasi dan sertifikat keahlian di bidang tatakelola pemerintahan, manajemen, keuangan, hukum atau bidang lain	Minimal 2 buah dokumen
3	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan sehat	1 buah dokumen

4	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	SKCK dilengkapi surat keterangan dari Pengadilan	2 buah dokumen
5	Melaporkan dan menyerahkan daftar kekayaan pribadi	LKHPN, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan kesiapan diaudit	3 buah dokumen
6	Mengenal daerah dan masyarakat	Menyerahkan naskah akademik visi misi dan program yang jelas	1 dokumen
7	Memiliki bukti pengabdian, pendidikan dan rekam jejak yang baik	Penghargaan dan Daftar Riwayat Hidup atau capaian tertentu	Minimal 2 dokumen



Gambar 2. Internalisasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah
Sumber: (Asri, 2020)

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Muhammad Aris Syaifuddin	Sekretaris Desa Lebo
2	Mahmudi Riyanto	Kepala Desa Lebo
3	Agus Syahputra	Warga Desa Lebo

Dinamika Diskursus Meritokrasi Birokrasi Sebagai Upaya Pemerataan Pendapatan Di Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Krida Wacana Christian University Student Paper	7%
2	stiepasaman.ac.id Internet Source	4%
3	www.journal.stiemb.ac.id Internet Source	4%
4	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On